



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2013 Halaman
<http://www.fisipundip.ac.id>

Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011 **Dewi masitoh, Susilo Utomo, Wiwik Widayati**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Fenomena golput yang terjadi di Kabupaten Pati pada Pemilu Kepala Daerah 2011 merupakan pemilhan umum kepala daerah yang mempunyai angka golput paling tinggi di Jawa Tengah pada saat itu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena golput yang terjadi pada Pilkada Pati 2011 dengan menggunakan pendekatan explanatory atau berbicara mengenai frekuensi. Metode ini merupakan penelitian survai dimana penulis mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu. Penulis mengembangkan konsep dan menghimpun fakt, tetapi tidak melakukan pengjian hipotesa, hasil survai dapat pula digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai fenomena social tertentu.

Perilaku golput pada masyarakat Pati dalam Pilkada 2011 dapat dilihat dari aspek teknis, aspek politis, aspek, idiologis dan aspek identitas seseorang. Dari hasil penelitian ini seseorang berperilaku golput dilihat dari aspek teknis karena adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih, misalnya memiliki kegiatan lain pada waktu yang bersamaan di hari pemilihan sehingga tidak bisa datang ke TPS. Pada aspek politis perilaku golput mempunyai alasan seperti tidak percaya dengan partai, calon/kandidat atau tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik. Sedangkan jika dilihat dari aspek identitas seseorang bias dilihat berdasarkan agama, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin dan lainya. Dari segi agama seseorang memutuskan untuk golput karena partai yang diharapkan tidak terpilih sebagai calon/kandidat, misalnya pada seseorang yang beragama Kristen cenderung tidak memilih partai yang mengusung Islam seperti PPP, PKB sedangkan yang umumnya pada calon atau parpol beraliran nasionalis dinilainya kurang respresentatif untuk mewedahi aspirasinya, maka golput akan menjadi pilihan akhir yang diambilnya.

Kata kunci: Perilaku golput, pilkada

Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011 **Dewi masitoh, Susilo Utomo, Wiwik Widayati**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro
Jln. Prof. Soedarto, Temabalang, Semarang, 50239, Telp/Fax: (024)7460058

Abstract

Abstention phenomenon that occurs in the Pati Regional Head Election 2011 was a general election officer who has the highest number abstentions in Central Java at the time. The study was conducted to analyze the phenomenon of non-voters who happen to Pati Election 2011 by using quantitative descriptive approach or talk about the frequency. This method is a survey study in which the authors took a simple of the population and the use of questionnaires as the main data collection tool. Descriptive research is intended to careful measurement of certain social phenomena. Authors develop the concept and to compile fakt, but do not do pengjian hyphotesis, the result of the survey can also be used to hold a certain predictions about social phenomena.

Abstentions of voter that occurs in Pati Election can be seen from the technical aspect, political aspect, ideological aspect and oersonal identity. This research found that the technical aspect have to be main reason why Pati's people unwilling to give vote. The technical aspect is constraints that make people couldn't voting, such as have other activities at the same time election day so could not come the polls. On the political aspects of behavior such as non-voters have no reason to believe the party, candidate/candidates or do not believe in change for the better. Meanwhile, if viewed from the aspect of one's identity may be seen by religion, level of education, age, gender and others. For example, if viewed in terms of religion for non-voters because someone decided that the party was not selected as candidate expected/ candidate, for example in someone who is Christian tends not vote for a party that carried Islam as PPP, PKB while generally on the wing nationalist candidate or political party judged less respresentatif to accommodate their asoirations, then the non-voters will be the final option is taken.

A. Pendahuluan

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan

pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist professional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Golongan putih atau yang biasa disebut golput merupakan bentuk dari partisipasi politik kolektif, yaitu suatu kegiatan warga negara yang dilakukan secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, misalnya seperti Pemilu. Golput juga merupakan bentuk dari partisipasi politik konvensional, yaitu dalam pemberian suara atau voting.

Secara sederhana sikap golput melalui macam-macam cara, mulai dari tidak datang di hari pemilihan, mencoblos di bagian putih kertas-suara dan bukan pada tanda gambarnya, hingga menusuk semua tanda gambar partai politik. Golput juga mempunyai makna yang luas seperti Orang yang tidak menghadiri TPS sebagai aksi protes, Orang yang menghadiri TPS tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar. Orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Seseorang memilih untuk golput atau tidak menggunakan hak suaranya juga bisa di pengaruhi oleh faktor identitas yaitu faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap perilaku golput yang berasal dari faktor-faktor inheren (faktor melekat yang berada dalam diri individu). Faktor-faktor tersebut terdapat pada identitas seseorang, yang meliputi; jenis kelamin, umur, status marital, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan dan lainnya. Dapat dilihat sebagai contoh tingginya angka golput di Kabupaten Pati pada pemlukada 2011.

Pada masa reformasi seperti sekarang ini makna atau istilah golput telah mengalami pergeseran. Hal itu tidak terlepas dari adanya perubahan paradigma bahwa memilih bukanlah seperti yang terjadi pada masa orde baru melainkan hak pemilih untuk ikut atau tidak dalam pemilu/pilkada. Oleh sebab itu, dengan perubahan paradigma tersebut istilah golput pada saat ini merupakan penyebutan untuk orang-orang yang tidak ikut dalam pemilu atau pilkada. Jika hanya dengan melihat hasil pemilu atau pilkada saja maka golput tidak mungkin terdeteksi dengan baik karena hasil pemilu tidak pernah disertai dengan informasi dan alasan mengapa pemilih ikut memilih atau tidak ikut memilih, bahkan ikut memilih tetapi secara salah.

Masalah yang dapat dirumuskan, dengan melihat tingginya angka golput di Kabupaten Pati pada Pilkada 2011 menggambarkan banyaknya masyarakat yang berperilaku golput serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Pati akan pentingnya pemilihan umum yang mana akan menentukan pemimpin mereka yang akan berpengaruh untuk masyarakat Pati. Menurut Ramlan Surbakti perilaku memilih adalah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu.

Pilkada langsung merupakan mekanisme pemilihan kepala daerah atau pejabat politik yang mana calon-calon pejabat tersebut langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 ayat 1).

Pilkada langsung diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung terhadap calon yang ada. Pilkada langsung dianggap sebagai sebuah kemajuan politik setelah sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan melalui system perwakilan yaitu dilakukan oleh anggota legislatif.

Secara kategoris, fenomena golput dapat ditafsir dengan beberapa cara. Pertama, golput adalah fenomena teologis. Fenomena ini terkait dengan tafsir keagamaan. Kedua, golput adalah

fenomena protes. Fenomena ini terutama di negara-negara yang demokrasiya baru mekar. Fenomena golput adalah ekspresi protes atau warganegara terhadap politisi dan partai politik yang dianggap tidak kunjung memberikan manfaat kepada mereka. Ketiga, fenomena golput adalah bentuk perlawanan terhadap bangunan sistem politik yang mengekang hak-hak politik warga negara.. Di Indonesia, gerakan golput yang dideklarasikan pada tahun 1970-an masuk dalam kategori ini. Keempat, golput sebagai bentuk kepercayaan terhadap sistem politik yang sedang bekerja. Fenomena ini muncul terutama di negara yang demokrasiya sudah mapan dan kesejahteraan masyarakatnya telah terjamin masuk dalam kategori ini adalah fenomena golput di Amerika Serikat. Kelima, golput adalah fenomena mal-administrasi. Dalam tafsir ini, golput lahir karena kekacauan administrasi pemilu. Pemilih sebenarnya berencana menggunakan hak pilihnya tetapi karena alasan administratif mereka tidak menggunakannya. Survei LSI (Agustus 2007) menunjukkan bahwa banyak pemilih yang tidak tahu namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak mendapatkan kartu pemilih, tidak mendapatkan kartu undangan, dan alamat yang tercantum dalam DPT tidak sesuai dengan alamat pemilih sebenarnya, adalah sebagai penyebab terjadinya golput. Dalam konteks itu, penyelenggara pemilu adalah pihak yang paling bertanggungjawab terjadinya golput. Keenam, golput adalah fenomena teknis individual. Beberapa hal yang masuk dalam aktivis teknis individual ini misalnya sedang berlibur, berkunjung ke famili jauh, dalam perjalanan, harus bekerja, ketiduran dan sebagainya. Individu pelaku golput lebih mementingkan keperluan-keperluan pribadi daripada pergi untuk menggunakan hak pilihnya. Ketujuh atau terakhir, golput adalah ekspresi kejenuhan masyarakat untuk mengikuti pemilu. Pemilih jenuh karena begitu banyaknya kejadian pemilu yang harus mereka ikuti. Seorang pemilih, dalam suatu massa tertentu akan mengikuti beberapa pemilu dalam rentang waktu yang tidak berbeda lama.

Dalam perkembangannya, keputusan untuk tidak memilih (golput) ternyata semakin rumit. Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pencoblosan). Pemilih (*voter*) tadi sudah terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi dengan sengaja tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan. Tentu saja kertas suara yang tidak digunakan tadi dianggap tidak sah. Sikap untuk tidak memilih (*no vote*) semakin rumit untuk dijelaskan. Mereka (calon pemilih) akan menolak untuk dicatatkan atau didaftarkan namanya sebagai calon pemilih. Caranya bisa dengan menolak untuk dilakukan pendataan ulang atau tidak mengisi formulir calon pemilih. Status sikap mereka yang tidak memilih dengan cara seperti ini tentunya tidak berbeda dengan mereka calon pemilih yang tidak mengetahui proses pendataan ulang sehingga namanya menjadi tidak tercantum dalam daftar pemilih resmi.

Pada Pemilu 2011 perilaku golput diambil dari beberapa faktor yaitu faktor teknis, faktor politis, faktor ideologis dan faktor identitas. Alasan teknis yaitu mereka yang tidak hadir atau berhalangan hadir karena alasan teknis, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah atau mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan penyelenggara pemilu. Alasan politis, yaitu mereka yang tidak mempunyai pilihan kepada kandidat karena tidak percaya pemilu atau pilkada tidak membawa perubahan yang lebih baik. Alasan ideologis mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama maupun alasan ideologi politik lain. Sedangkan alasan identitas yaitu mereka yang tidak memilih dikarenakan beberapa hal yang ada dalam diri seseorang seperti agama, pendidikan, jenis kelamin dan sebagainya. Masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fenomena golput yang terjadi di Kabupaten Pati dalam Pilkada 2011?

2. Bagaimana keterkaitan faktor identitas berpengaruh pada faktor teknis, faktor politis, dan faktor ideologis terhadap perilaku golput pada Pilkada Kabupaten Pati 2011?

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif atau berbicara mengenai frekuensi. Metode ini merupakan penelitian survai dimana penulis mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu. Penulis mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengkajian hipotesa, hasil survai dapat pula digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai fenomena social tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data menggunakan analisis *independence sample t-test* yang digunakan karena adanya dua variasi dan *Anova One Way* digunakan karena variasi lebih dari dua.

Dari hasil penelitian dari 100 responden maka dapat diketahui bahwa secara teknis responden yang tidak memberikan suaranya pada Pemilu Kabupaten Pati 2011, sebagian besar disebabkan oleh adanya kegiatan lain yang dinilai lebih urgen oleh responden, yang pelaksanaannya bersamaan pemungutan suara, sehingga dirinya tidak memberikan suaranya. Kegiatan lain tersebut menurut sebagian besar responden merupakan usaha dasar, di mana apabila dirinya meninggalkannya, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi keluarga. Hal ini bisa dimengerti karena umumnya responden bekerja di sektor agraris, sehingga menuntut kesehariannya untuk aktif mengerjakan pekerjaannya. Secara politis responden yang memberikan suaranya pada Pemilu Kabupaten Pati 2011, lebih disebabkan karena adanya figur atau tokoh yang disukai, sehingga diharapkan mampu membawa perubahan pemerintahan dan perubahan di Kabupaten Pati. Fenomena menarik juga bisa diungkapkan bahwa mayoritas responden (77 persen) memberikan suaranya pada Pemilu Kabupaten Pati 2011 kemarin, bukan dikarenakan afiliasi partai politik yang mengusung kandidat. Hal ini memberikan peringatan dini kepada parpol, bahwa parpol pada kebanyakan persepsi masyarakat Pati dinilai kurang dipercaya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Hal ini bisa dimengerti karena kinerja parpol melalui elite-elite yang duduk di legislatif maupun eksekutif (sebagaimana sering ditayangkan media massa), ternyata kurang peduli pada aspirasi masyarakat dan cenderung mengumbar janji saat kampanye, namun begitu terpilih mereka akan serta merta melupakan apa yang pernah dijanjikan sebelumnya kepada konstituen. Sedangkan secara ideologis, responden yang memberikan suaranya pada Pemilu Kabupaten Pati 2011, menganggap bahwa pemilihan kepala daerah sebagaimana dalam Pemilu Kabupaten Pati ini adalah cara yang tepat dalam menentukan seorang Kepala Daerah, sehingga dapat diharapkan membawa perubahan pemerintahan dan perubahan di Kabupaten Pati. Fenomena menarik juga bisa diutarakan bahwa mayoritas responden (66 persen) memberikan suaranya pada Pemilu Kabupaten Pati 2011 kemarin, bukan dikarenakan kesesuaian aspirasi, namun lebih dikarenakan dirinya bahwa sistem pemerintahan selama ini dinilainya tidak mampu menampung aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Hal ini memberikan peringatan dini kepada seluruh kandidat juga parpol kontestan, bahwa persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini adalah kurang kepedulian masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya disebabkan beberapa preseden buruk sebelumnya. Kondisi semacam ini bisa dimengerti karena kinerja kandidat dan parpol setelah mereka terpilih dan duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, ternyata kurang peduli lagi pada aspirasi masyarakat yang dulu mendukungnya. Tingginya reduksi kepercayaan publik pada calon kandidat semacam ini sepenuhnya tidak bisa disalahkan, karena umumnya orang kebanyakan masih awam akan pengetahuan dan pemahaman politiknya.

Bagi kebanyakan masyarakat, bahwa dengan maraknya tayangan di televisi yang kerap kali menyiarkan para eksekutif dan legislatif yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, cukup baginya untuk menarik kesimpulan sederhana untuk tidak mempercayai sistem pemilihan langsung sebagaimana selama ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku golput selain faktor teknis, faktor politis dan faktor ideologis juga adanya faktor identitas yang berpengaruh pada ketiga faktor teknis, politis, dan ideologis sehingga berpengaruh pada perilaku golput di masyarakat Pati. Faktor identitas yang mana berpengaruh dalam perilaku golput seseorang yang berasal dari faktor-faktor inheren (faktor melekat yang berada dalam diri individu). Faktor-faktor tersebut antara lain sebagaimana dijelaskan dalam identitas responden, yang meliputi; jenis kelamin, umur, status marital, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status sosial.

Asumsi peneliti dengan mengangkat variabel inheren di atas, didasarkan pada pendekatan sosiologis yang memandang bahwa perilaku memilih atau *voting behavior* dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya ekonomi, etnik, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi, karakter sosial akan menentukan kecenderungan memilih, bahwa sebuah kultur yang sama akan melahirkan sebuah kesamaan pula dalam perilaku memilih. Kesamaan ini muncul karena pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang relatif sama. Menurut Muhammad Asfar, pendekatan sosiologis menganggap bahwa pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Lebih lanjut Muhammad Asfar menjelaskan bahwa dengan demikian, pemahaman terhadap pengelempokkan sosial baik formal maupun informal adalah hal terpenting dalam memahami perilaku politik.

Alasan individu berperilaku golput menurut karakteristik dapat dilihat dari usia, alasan tidak ikut memilih terbagi antara alasan administrasi dan teknis atau individual. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, di kalangan laki-laki, golput lebih banyak terjadi karena alasan teknis/individual, sementara di kalangan perempuan golput lebih banyak terjadi karena alasan administratif. Dari segi pendidikan, di kalangan orang yang berpendidikan tinggi, cukup besar proporsi golput yang terjadi akibat alasan-alasan politis seperti ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pilkada dan dilihat dari pekerjaan, orang yang basis pekerjaannya adalah harian (seperti tukang ojek, membuka warung, pedagang keliling dan sebagainya), sebagian besar golput karena alasan teknis. Sementara untuk kategori pekerjaan lain, sebagian besar golput terbagi antara alasan administrasi dan teknis/individual.

Dalam rangka untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk golput tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi positif untuk memberikan suatu wacana, walaupun secara akademis belum mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati, ketika Pemilukada Bupati dan Calon Bupati tahun 2011, maka ditemukan beberapa simpulan bahwa selain variabel yang berdasarkan teknis, politis dan ideologis variabel agama dan tingkat pendidikan yang merupakan termasuk dalam faktor identitas juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk golput. Gejala yang tampak di masyarakat Pati, ketika dilakukan wawancara dengan beberapa responden adalah adanya kecenderungan bahwa faktor agama menjadi salah satu determinan penting yang melatarbelakangi seseorang untuk berperilaku golput, dari hasil penelitian pada masyarakat Pati pemeluk agama Islam ortodoks yang cenderung untuk tidak memilih calon (kandidat) atau parpol yang tidak memiliki asas dan ideologi yang sama dengan dirinya, sementara pilihan alternatif yang dinilai masih satu ideologis namun berbeda mazhab tidak tersedia, maka muncul kecenderungan untuk berperilaku golput. Hal ini semakin

diperparah lagi bilamana calon atau kandidat atau parpol yang ikut menjadi kontestan dinilainya tidak akan mampu membawa perubahan sosial yang signifikan, maka muncullah potensinya untuk berperilaku golput. Begitu juga dengan pemeluk agama Kristen dan Katholik di mana dirinya akan melakukan golput bilamana calon atau kandidat atau parpol yang ikut dalam pesta demokrasi menurut pandangannya termasuk sesuatu yang dijadikan “phobia” atau “momok”, serta pilihan alternatif di luar itu tidak ditemukan, maka potensi munculnya golput pada individu tersebut akan semakin tinggi. Beberapa penganut Kristen Katholik cenderung tidak akan memilih calon atau kandidat atau parpol yang mengusung isu “Islam minded” atau dalam terminologi dirinya digolongkan beraliran ekstrim, sementara pilihan utamanya (seperti Partai Demokrasi Sejahtera/PDS, yang mengusung ideologis Katholik) tidak terwakili, di sisi lain pilihan alternatif (yang umumnya pada calon atau parpol beraliran nasionalis, seperti PDIP atau Golkar) dinilainya kurang representatif untuk mewadahi aspirasinya, maka golput akan menjadi pilihan akhir yang diambilnya.

Sedangkan bila ditinjau dari tingkat pendidikan, maka terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin rendah kecenderungan seseorang untuk berperilaku golput. Faktanya pada masyarakat Pati yang agraris, di mana masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, buruh industri, di mana pengerjaannya harus dilakukan dalam keseharian dan tidak bisa ditinggalkan, sehingga walaupun dirinya mengetahui kapan waktunya melakukan pemberian suara di TPS, namun karena urgennya pekerjaan baginya dan keluarganya, maka dengan terpaksa pilihan untuk berperilaku golput menjadi alternatif utama. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan rendahnya pengetahuan, pemahaman dan pendidikan politik yang dimiliki masyarakat berpendidikan rendah, bahwa mekanisme pemilihan umum merupakan suatu cara untuk memperbaiki kesejahteraan, tidak dapat dipahami secara komprehensif, sehingga tindakan untuk memberikan suara di TPS bukan menjadi pilihan yang menantang.

C. Penutup

Perilaku golput di Kabupaten Pati lebih diwarnai faktor politis dan faktor ideologis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa hasil dari Pemilihan Kabupaten Pati 2011 tidak mampu memberikan harapan perubahan pada Kabupaten Pati (54%). Kondisi tersebut akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Sedangkan pada faktor ideologis dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (66%) menganggap sistem yang ada sekarang tidak sesuai dengan pandangan masyarakat. Hal ini karena mekanisme pemilihan langsung dalam Pilkada cenderung dimanfaatkan oleh para politisi untuk membeli suara masyarakat serta memberikan janji-janji yang tidak pernah dipenuhi dengan baik. Selain beberapa hal tersebut, ada alasan lain misalkan karena bertepatan dengan hari libur nasional, sehingga lebih memilih untuk berlibur panjang bersama keluarga. Selain itu, masyarakat Pati bisa jadi merupakan orang perantauan, sehingga mereka memilih untuk tetap bekerja mencari uang daripada pulang kampung hanya untuk mencoblos.

Faktor identitas yang meliputi jenis kelamin, umur, status marital, agama, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan status sosial secara umum tidak mempengaruhi perilaku golput pada uji T, hanya pendidikan dan agama yang mempengaruhi perilaku golput di Kabupaten Pati pada Pilkada 2011. Dari segi pendidikan, di kalangan orang yang berpendidikan tinggi, cukup besar proporsi golput yang terjadi akibat alasan-alasan seperti ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pilkada dan dilihat dari segi yang pendidikannya rendah yang sebagian besar bekerja sebagai tukang ojek, membuka warung, pedagang keliling dan sebagainya lebih memilih untuk bekerja.

Sedangkan dari segi agama dari hasil penelitian pada masyarakat Pati pemeluk agama Islam ortodoks yang cenderung untuk tidak memilih calon (kandidat) atau parpol yang tidak memiliki asas dan ideologi yang sama dengan dirinya, sementara pilihan alternatif yang dinilai masih satu ideologis namun berbeda mazhab tidak tersedia, maka muncul kecenderungan untuk berperilaku golput. Begitu pula pada pemeluk agama Kristen Katholik, beberapa penganut Kristen Katholik cenderung tidak akan memilih calon atau kandidat atau parpol yang mengusung isu “Islam minded” atau dalam terminologi dirinya digolongkan beraliran ekstrim, sementara pilihan utamanya (seperti Partai Demokrasi Sejahtera/PDS, yang mengusung ideologis Katholik) tidak terwakili, di sisi lain pilihan alternatif (yang umumnya pada calon atau parpol beraliran nasionalis, seperti PDIP atau Golkar) dinilainya kurang representatif untuk mewadahi aspirasinya, maka golput akan menjadi pilihan akhir yang diambilnya.

Perilaku golput di Kabupaten Pati pada Pilkada 2011 yang lebih diwarnai faktor Politis dan Ideologis bahwa banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya pemilu yang akan membuat adanya perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan ataupun pemerintahan yang lebih baik. Penulis merasa hal semacam ini perlu dibenahi lagi didalam parpol yang harusnya lebih memperhatikan calon anggotanya yang akan dijadikan kandidat kepala daerah hal ini terbukti pada hasil dari penelitian bahwa masyarakat di Kabupaten Pati lebih mementingkan figure yang akan menjadi pemimpin daripada melihat asal partai darimana calon tersebut. Untuk itu partai politik saat ini harusnya sangat memperhatikan anggota-anggota parpol yang akan dicalonkan oleh partai tersebut tidak hanya asal mencalonkan saja. Selain itu tingkat kesadaran dan pengetahuan politik yang masih redah pada masyarakat Pati juga hendaknya lebih mendapat perhatian, khususnya dalam mensosialisasikan ketika menjelang Pemilu/Pilkada karena perkembangan sikap apatisme masyarakat yang sangat tinggi terhadap hasil yang akan dicapai dengan adanya pemilihan pemimpin ini sehingga kesadaranlah yang dirasa sangat penting yang harus dimiliki oleh masyarakat Pati tentang pentingnya suara mereka dalam ikut serta memilih pemimpin yang akan menjadi pemimpin bagi mereka beberapa periode kedepan.

D. Daftar pustaka

Arifin Rahmat, 1998. *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: Penerbit SIC

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Huntington, P Samuel dan Nelson Joan. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Idrus Muhammad, 2009. *Metode Pemilu Perilaku Pemilih & Kepartaian Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga

Idrus muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga

Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kencana Inu Syafii, 1994. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Mandar Maju

Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya

Leo Agustino, 2009 *Politik & Perubahan antara Reformasi Politik di Indonesia & Politik baru di Malaysia*, Jakarta: Graha Ilmu

Masri singarimbun, Fffendi sofian, 2006, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES

Pamungkas,Sigit.2009.*Pemilu Perilaku Pemilih & Kepartaian*.Yogyakarta:Institute For Democracy and Welfarism

Rush Michael dan Althoff,1989. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : PT Rajawali

Rahmat, Arifin.1998.*Sistem Politik Indonesia*.Surabaya : SIC

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali

Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sukarna,1992.*Sistem Politik Indonesia II*,Bandung:CV.Mandar Jaya

Skripsi Fenomena Golput Pada Pilgub Jateng 2008-2013.

Teuku May Rudy,1993.*Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, PT.Eresco

Wahyudi Kumorotomo, 1999. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press

INTERNET

[http//www.kompas.com](http://www.kompas.com)

www.lsi.co.id *Golput Dalam Pilkada*, Kajian Bulanan LSI Edisi 05 September 2007, oleh Eriyanto.